

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten di Pulau Sumatera tahun 2009-2013 dikategorikan sangat rendah dengan rata-rata rasio kemandirian sebesar 5,96%. Secara rata-rata *trend* kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten mengalami peningkatan kecuali tahun 2010, pada tahun 2009 rasio KKD sebesar 5,80% menjadi 6,71% pada tahun 2013. Kabupaten Karimun yang kaya akan potensi penerimaan PAD dan juga sebagai Wilayah *Free Trade Zone* Batam Bintan dan Karimun (FTZ BBK), menjadikan Kabupaten Karimun memiliki rasio KKD tertinggi dengan rasio kemandirian rata-rata sebesar 49,39%, sedangkan Kabupaten dengan rasio kemandirian keuangan daerah terendah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan rata-rata rasio kemandirian sebesar 1,50%. Rendahnya KKD Kabupaten Bengkulu Tengah disebabkan karena minimnya potensi PAD yang dimilikinya sehingga realisasi penerimaan APBD didominasi dana perimbangan. Kabupaten dengan *Trend* KKD positif berjumlah 68 Kabupaten, mengartikan bahwa sebanyak 68% KKD Kabupaten di Pulau Sumatera telah terjadi perkembangan, dan Kabupaten dengan *Trend* KKD negatif berjumlah 32 Kabupaten. *Trend* KKD tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan *trend* rata-rata sebesar 527,16%, sedangkan

Kabupaten dengan *trend* KKD terendah adalah Kabupaten Siak dengan *trend* rata-rata sebesar -56,47%.

2. Kemandirian keuangan daerah antar Kota di Pulau Sumatera tahun 2009-2013 juga masuk dalam kategori sangat rendah, dengan rata-rata rasio kemandirian sebesar 12,55%. Secara rata-rata *trend* kemandirian keuangan daerah antar Kota terus mengalami peningkatan dari tahun 2009-2013, pada tahun 2009 rasio KKD sebesar 8,89% menjadi 16,10% pada tahun 2013. Kota Medan merupakan daerah dengan rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi dengan rasio rata-rata sebesar 54,27% hal ini disebabkan karena Kota Medan memiliki Potensi PAD terbesar yang merupakan Kota terbesar di Pulau Sumatera, sedangkan Kota dengan rasio kemandirian keuangan daerah terendah adalah Kota Subulussalam dengan rata-rata rasio kemandirian sebesar hanya 2,06%. Kota dengan *Trend* KKD positif berjumlah 29 Kota, atau sebanyak 91% KKD Kota di Pulau Sumatera telah terjadi perkembangan, dan Kota dengan *Trend* KKD negatif berjumlah 3 Kota. *Trend* KKD tertinggi adalah Kota Medan dengan *trend* rata-rata 144,61%, sedangkan Kota dengan *trend* KKD terendah adalah Kota Solok dengan *trend* rata-rata sebesar -17,27%.

3. Kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2009-2013 dikategorikan sangat rendah, dengan rata-rata rasio kemandirian sebesar 7,56%. Secara rata-rata *trend* kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten/Kota juga mengalami peningkatan dari tahun 2009-2013 kecuali tahun 2010, hal ini dipengaruhi oleh penurunan *trend*

KKD antar Kabupaten pada tahun tersebut. Pada tahun 2009 rasio KKD antar Kabupaten/Kota sebesar 6,55% menjadi 8,98% pada tahun 2013. Daerah dengan rasio KKD tertinggi antar Kabupaten/Kota adalah Kota Medan dan Kabupaten Bengkulu Tengah adalah daerah dengan rasio KKD terendah antar Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Trend* KKD tertinggi antar Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan daerah dengan *trend* tertinggi antar Kabupaten, Sedangkan daerah dengan *trend* KKD terendah adalah Kabupaten Siak, yang juga merupakan daerah dengan *trend* KKD terendah antar Kabupaten.

4. Pemerataan kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten di Pulau Sumatera tahun 2009-2013 dalam kategori timpang, dengan rentang *Indeks Williamson* antara 0,71-0,57. Ketimpangan kemandirian keuangan daerah lebih rendah dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan perkapita antar Kabupaten di Pulau Sumatera tahun 2009-2013. Ketimpangan kemandirian keuangan antar Kabupaten disebabkan karena perbedaan kemandirian antar Kabupaten di Pulau Sumatera masih terpaut jauh antara Kabupaten yang sudah maju dengan Kabupaten yang baru terbentuk dengan potensi PAD yang masih sangat minim.
5. Pemerataan kemandirian keuangan daerah antar Kota di Pulau Sumatera pada tahun 2009-2010 juga dalam kategori timpang, sedangkan pada tahun 2011-2013 dalam kategori merata moderat. Nilai *Indeks Williamson* dari tahun 2009-2013 terus mengalami penurunan, pada tahun 2009 *Indeks*

Williamson sebesar 0,55 dan menjadi 0,36 pada tahun 2013. Perkembangan pemerataan kemandirian keuangan daerah lebih merata dibandingkan dengan pemerataan pendapatan perkapita antar Kota di Pulau Sumatera tahun 2009-2013.

6. Pemerataan kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera pada tahun 2009-2012 dalam kategori timpang, sedangkan pada tahun 2013 dalam kategori merata-moderat. Pada tahun 2009 *Indeks Williamson* sebesar 0,65 turun hingga menjadi 0,48 pada tahun 2013. Perkembangan pemerataan kemandirian keuangan daerah juga lebih merata dibandingkan dengan pemerataan pendapatan perkapita antar Kota yang juga cenderung fluktuatif.

5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rendahnya kemandirian keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera disebabkan karena penerimaan PAD yang masih rendah, maka diharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera agar lebih optimal mengelola dan menggali sumber-sumber potensi PAD agar kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan.
2. Bercermin kepada daerah dengan kemandirian yang tinggi, bahwa pendapatan pajak daerah menjadi komponen terbesar PAD, maka diharapkan kepada daerah Kabupaten/Kota dengan PAD yang rendah, agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan pengelolaan penerimaan

dari pajak daerah untuk meningkatkan PAD. Peningkatan PAD akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sehingga pemerataan kemandirian keuangan antar Kab/Kota akan lebih merata.

3. Kepada daerah Kabupaten yang kaya sumber daya alamnya tetapi rasio KKD-nya rendah, diharapkan lebih aktif dalam mengelola hasil kekayaan daerah menjadi sumber-sumber pendapatan baru, dan kepada pemerintah pusat agar terus melakukan pemantauan kepada daerah yang kaya akan sumber daya alamnya agar tidak menimbulkan kecemburuan bagi daerah yang miskin atau bahkan tidak memiliki potensi sumber daya alam.
4. Kepada pemerintah pusat agar memberikan perhatian lebih kepada daerah Kabupaten/Kota yang rasio kemandiriannya rendah, dengan cara membantu daerah untuk menemukan potensi-potensi unggulan sebagai sumber penerimaan PAD, kemudian memberikan bantuan pendanaan awal untuk mengelolanya, dengan demikian kemandirian keuangan daerah yang masih rendah dapat ditingkatkan.
5. Melihat bahwa daerah kemandirian yang sangat rendah diantara kemandirian Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera adalah rata-rata daerah hasil pemekaran, maka kepada pemerintah daerah yang ingin memekarkan daerahnya agar tetap mematuhi peraturan perundang-undangan terutama pemenuhan syarat teknis berupa kemampuan ekonomi daerah, potensi daerah, kemampuan keuangannya, dan bukan pemenuhan untuk kepentingan kelompok tertentu, dan kepada pemerintah pusat agar tetap selektif dalam menyeleksi pengajuan pemekaran daerah otonomi baru agar

tetap sesuai dengan semangat reformasi dan tujuan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia demi tercapainya Indonesia lebih baik.

6. Penelitian ini memang hanya lingkup Kabupaten/Kota di pulau Sumatera, tetapi peneliti berharap besar kecilnya dapat menggambarkan kondisi Kabupaten/Kota di Indonesia secara keseluruhan, karenanya hasil penelitian ini bisa dijadikan untuk merumuskan kebijakan berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah baik oleh pemerintah daerah sendiri maupun oleh pemerintah pusat.

